

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi secara umum merupakan pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah dirancang dengan cermat, sistematis, dan jelas. Proses ini dilakukan ketika seluruh perencanaan telah disiapkan secara matang dan memiliki kepastian arah serta tujuan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata, tetapi juga mencakup penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, implementasi juga mengandung unsur penyesuaian terhadap norma, prosedur, atau kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan dampak atau perubahan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan atau kebijakan (Akay et al., 2021). Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang didasarkan pada pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, guna mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan terarah. Melalui pelaksanaan tersebut, kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif dan membawa perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat serta berkontribusi

dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi target dari program yang diterapkan.

Implementasi kebijakan adalah langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau sektor swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk merealisasikan tujuan dari suatu keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaannya biasanya diwujudkan dalam bentuk undang-undang, peraturan, serta keputusan-keputusan strategis. Implementasi kebijakan diperlukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan yang harus ditangani. Edward III mengajukan pendekatan dalam menganalisis implementasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Jann Wegrich dalam (Desrinelti et al., 2021) Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan, bukan sekadar tindakan yang dilakukan secara kebetulan. Kebijakan ini juga mencakup serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan memiliki pola tertentu dalam upaya mencapai tujuan, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, bukan berdasarkan keputusan individu semata. Selain itu, kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan terarah oleh pemerintah dalam bidang tertentu. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk keputusan untuk tidak mengambil

tindakan jika dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dalam situasi tertentu.

Kebijakan publik dibuat dalam memecahkan berbagai problem yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh negara. Namun pada kenyataannya yang terjadi seringkali kebijakan publik tidak mampu memperbaiki keadaan atau problema masyarakat, sehingga berbagai kebijakan ini sangat rentan menimbulkan kritik apabila tidak dipahami mengapa government mengambil strategi tersebut. Ilmu kebijakan publik hadir dalam mengkaji berbagai kebijakan tersebut (Malau et al., 2024).

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan di berbagai sektor. Selain menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik juga berperan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Proses penyusunan, implementasi, dan evaluasinya melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, legislatif, pemimpin, serta partisipasi aktif dari masyarakat (Iriawan, 2024). Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu melalui implementasi kebijakan formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur upaya pembangunan masyarakat dan negara secara terarah dan sistematis. Produk hukum tersebut bersifat

dinamis, mampu mengantisipasi perubahan, serta mendorong inovasi dalam proses pembangunan (Anisya, 2023).

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang wajib dilaksanakan atau ditinggalkan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diikuti oleh individu maupun kelompok. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, dan biasanya disertai dengan tindakan atau sanksi yang bertujuan untuk mengatasi isu tersebut secara tegas dan terarah (Marwiyah, 2022). Sementara itu, James E. Anderson dalam (Saputra, 2023) juga mengamati bahwa: Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh badan dan pejabat pemerintah. Mengenai kebijakan publik, Menurut Samodra.W.Dk dalam (Mansur, 2021) menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan publik merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam (Marwiyah, 2022) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan isi atau substansi dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti program, layanan, atau tindakan tertentu. Sementara itu, kebijakan prosedural berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, termasuk mekanisme, tata cara, dan proses pelaksanaannya.

- b. Kebijakan *distributive*, kebijakan regulatori dan kebijakan *redistributive*

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang berfokus pada pemberian layanan atau pemanfaatan sumber daya kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, kebijakan regulatori adalah kebijakan yang menetapkan pembatasan, larangan, atau pengendalian terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif bertujuan untuk mengatur alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak tertentu

antar kelompok masyarakat guna menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material memberikan keuntungan sumber daya secara langsung dan terukur kepada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis memberikan manfaat dalam bentuk pengakuan atau dukungan tanpa keuntungan material langsung.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum mengatur penyediaan barang atau layanan publik yang dapat diakses semua orang. Sedangkan kebijakan barang privat mengatur penyediaan barang atau layanan yang diperuntukkan bagi pasar bebas dan bersifat terbatas.

3. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam (Marwiyah, 2022) adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah proses strategis dalam perumusan kebijakan publik, yang berfungsi sebagai ruang untuk merespon berbagai kebutuhan. Dalam tahap ini, penting untuk menetapkan isu publik yang akan diangkat menjadi perhatian pemerintah. Isu kebijakan, atau masalah kebijakan publik, biasanya muncul akibat

perbedaan pendapat antar aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan diambil terkait karakter permasalahan tersebut..

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan tahap di mana masalah yang telah masuk dalam agenda dibahas oleh para pembuat kebijakan, kemudian didefinisikan secara jelas dan dicari solusi terbaiknya melalui berbagai alternatif. Setiap alternatif kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai solusi resmi yang akan diambil dan diterapkan dalam bentuk kebijakan publik.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah memberikan otorisasi terhadap proses pemerintahan. Jika legitimasi didasarkan pada kedaulatan rakyat, maka warga negara cenderung mengikuti arahan pemerintah. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap rencana dan tindakan pemerintah menjadi kunci dukungan. Legitimasi dapat dibentuk melalui proses yang memungkinkan warga belajar untuk mendukung pemerintah, meskipun terkadang dapat dikelola melalui manipulasi.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan oleh unit-unit administrasi dengan mengerahkan sumber daya finansial dan manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

e. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian terhadap substansi, pelaksanaan, dan dampak dari suatu kebijakan. Evaluasi ini bersifat fungsional, artinya tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi sepanjang seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi mencakup tahap perumusan masalah, usulan program, implementasi, hingga dampak kebijakan yang dihasilkan.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edward III

Teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III menggunakan pendekatan *top-down*, yaitu pendekatan dari atas ke bawah. Dalam teorinya, Edward III mengidentifikasi empat indikator utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi akan berjalan efektif jika para pelaksana memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka, dan hal ini hanya dapat tercapai melalui komunikasi yang baik. Oleh karena itu, setiap kebijakan serta aturan pelaksanaannya harus disampaikan kepada pihak yang tepat dengan informasi yang jelas, akurat, dan konsisten, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Transmisi : Proses penyampaian komunikasi yang efektif akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) dalam proses ini. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai tingkatan birokrasi yang dapat menyebabkan distorsi pesan sehingga tujuan kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas.
- b. Kejelasan : Informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) harus disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Meskipun dalam beberapa kasus ketidakjelasan pesan tidak selalu menghambat implementasi, para pelaksana tetap memerlukan kejelasan informasi agar kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi : Instruksi yang diberikan dalam proses komunikasi harus tetap konsisten agar dapat diterapkan dengan baik. Jika perintah sering berubah-ubah, maka dapat menyebabkan kebingungan di antara para pelaksana di lapangan dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator sumber daya mencakup beberapa elemen berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (Staf) : Sumber Daya Manusia menjadi elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan implementasi sering kali terjadi akibat kurangnya jumlah staf, kurangnya kompetensi, atau ketidaksesuaian keahlian dengan tugas yang diemban. Oleh karena itu, tidak hanya jumlah staf yang harus memadai, tetapi juga perlu adanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai agar kebijakan dapat diterapkan dengan optimal.
- b. Informasi : Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua aspek utama: (i) informasi terkait prosedur dan cara menjalankan kebijakan, di mana pelaksana harus memahami tugas yang harus dilakukan saat diberikan instruksi, serta (ii) informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga pelaksana dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menaati ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang : Otoritas formal diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Wewenang memberikan legitimasi bagi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya legitimasi yang jelas, pelaksana kebijakan akan kehilangan kekuatan di mata publik, yang pada akhirnya dapat menghambat atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas : Sarana dan prasarana fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun tersedia staf yang

kompeten, pemahaman yang baik, dan wewenang yang jelas, tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan adalah sikap, pemahaman, dan komitmen terhadap kebijakan yang dijalankan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan pelaksana. Tanpa sikap positif dan pemahaman yang baik, kebijakan berisiko menyimpang atau gagal dilaksanakan. Indikator disposisi mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Pengangkatan Birokrasi : Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- b. Insentif : George C. Edward III menyatakan bahwa untuk mengatasi rendahnya motivasi pelaksana kebijakan, salah satu cara efektif adalah melalui pemberian insentif. Karena pada umumnya individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya, insentif dapat menjadi dorongan yang kuat agar pelaksana menjalankan tugas dan tanggung jawab kebijakan dengan lebih baik. Insentif ini

dapat berupa manfaat tambahan atau kompensasi tertentu yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dan kinerja pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan indikator keempat yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mendukung keputusan politik dengan memastikan adanya koordinasi yang baik, prosedur yang jelas, serta jalur komunikasi yang efektif agar kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

George C. Edward III mengidentifikasi dua karakteristik utama yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi agar lebih efektif, yaitu :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Fleksibel :
SOP merupakan serangkaian prosedur atau kegiatan rutin yang dirancang untuk memandu pelaksana kebijakan, seperti aparatur, administrator, atau birokrat, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. SOP yang fleksibel memungkinkan para pegawai bekerja lebih efisien sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan oleh masyarakat.
- b. Menerapkan Fragmentasi : Fragmentasi bertujuan untuk membagi tanggung jawab berbagai aktivitas, program, atau kebijakan ke dalam beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidang masing-

masing. Dengan adanya fragmentasi, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif karena setiap unit kerja bertanggung jawab atas tugas yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Hal ini memastikan kebijakan dijalankan oleh organisasi yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai.

2.4 Sistem Informasi

Pada era digital saat ini, penggunaan sistem informasi menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Sistem informasi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan data. Sistem informasi mendukung efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan data.. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien (Adham, 2024). Sistem informasi merupakan alat penting yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan individu di era digital. Menurut (Murphy, 2020) Sistem Informasi (SI) adalah gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Secara lebih luas, sistem informasi merujuk pada interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi dalam suatu sistem yang terintegrasi. Memahami konsep dasar dan manfaatnya merupakan Langkah awal untuk memanfaatkannya secara optimal. Analisis implementasi sistem informasi menjadi penting untuk dilakukan agar lebih

memperjelas dengan mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

1. Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi yang terintegrasi dan saling terhubung dalam satu kesatuan, yaitu SIPD, untuk menyajikan informasi pemerintahan daerah secara efektif dan transparan. SIPD merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai data terkait pembangunan, keuangan, dan administrasi pemerintahan daerah. SIPD berfungsi sebagai platform yang mendukung pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaporan keuangan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan dalam audit. Dengan adanya SIPD, tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif dan terkendali, sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan dalam pengelolaan data terkait pembangunan, keuangan, serta aspek lain yang mendukung jalannya pemerintahan daerah. SIPD berfungsi sebagai wadah penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data pembangunan daerah yang dapat diakses oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Tujuan utama dari

sistem ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi guna mendukung efektivitas pembangunan daerah.

Menurut (Musyarrifa et al., 2024) Dalam pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aspek komunikasi, baik yang berbasis teknologi maupun non-teknologi, perlu mendapat perhatian khusus. Komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan SIPD. Setiap informasi yang disampaikan dalam komunikasi berperan sebagai tolak ukur dalam proses pengembangan sistem ini. Infrastruktur jaringan menjadi elemen mendasar dalam membangun konektivitas komunikasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Dengan jaringan komunikasi yang optimal, aliran data dapat berjalan dengan lancar dan terpusat, sehingga mendukung pengelolaan data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, jaringan komunikasi juga berperan dalam memperluas jangkauan penyebaran informasi yang berasal dari SIPD.

2. Jenis-jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan berbagai jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan dalam mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Sistem ini mencakup data mengenai kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, aspek ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, layanan publik, serta daya saing daerah, yang semuanya menjadi komponen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Dengan adanya SIPD, analisis dan profil pelaksanaan pembangunan daerah dapat diakses dengan lebih mudah, sekaligus menjadi dasar dalam pembaruan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan. Informasi yang dihimpun mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, aspek ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta tingkat daya saing daerah.

b. Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi dalam mengelola data keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas serta transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Penyusunan Anggaran Daerah
2. Pelaksanaan serta Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Keuangan Daerah
5. Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah
6. Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penggunaan anggaran. Perencanaan, pengkodean, dan pengalokasian anggaran dilakukan secara rinci agar pelaksanaannya tepat sasaran serta menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Selain itu, pengkodean kegiatan secara nasional memudahkan sinkronisasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat, khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga dapat menyediakan berbagai informasi umum terkait penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut mencakup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun, Peraturan Daerah (PERDA), serta informasi lainnya yang dikelola oleh berbagai pihak terkait dalam pemerintahan.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SIPD

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, beberapa jurnal penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dan gambaran bagi peneliti dalam melaksanakan studi ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Novira & Putri, n.d.)	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Garut masih terkendala komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan SDM dan fasilitas, serta disiplin pegawai yang rendah. Selain itu, ketiadaan SOP menghambat pelaksanaan. Perbaikan diperlukan melalui peningkatan disiplin, penyusunan SOP, dan penguatan fasilitas teknologi.
2.	(Karundeng et al., 2021)	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan	Deskriptif Kualitatif	Implementasi SIPD di Bappelitbangda Biaro berjalan sesuai regulasi dengan koordinasi yang baik. Namun, kendala seperti keterbatasan akses

	Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		publik, pelatihan SDM, dan gangguan jaringan masih perlu diatasi. Meskipun begitu, SIPD membantu integrasi perencanaan dan penganggaran, mempermudah koordinasi, serta meningkatkan transparansi
3. (Marian a, 2024)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah- an Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan SIPD di BPKAD Kota Bekasi masih terkendala kurangnya pemahaman SDM, meskipun ada sosialisasi, terbatasnya layanan pengaduan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM. Infrastruktur memadai,

	Daerah Kota Bekasi		tetapi akses aplikasi terhambat oleh server Kemendagri yang belum optimal. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai kejelasan SOP dan pembagian tugas.
4.	(Cahnia et al., 2024)	Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma	Deskriptif Kualitatif Implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Seluma telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan bagi operator, keterbatasan jaringan internet, dan gangguan sistem. Meskipun demikian, komunikasi dan struktur birokrasi dalam penerapan SIPD sudah sesuai dengan prosedur, sehingga mendukung penyusunan dokumen

				perencanaan pembangunan daerah.
5.	(Aditya et al., 2024)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi SIPD di Kecamatan Sumbang, Banyumas, berjalan sesuai regulasi dengan komunikasi dan SDM yang memadai. Namun, kendala utama adalah error sistem. Meski begitu, SIPD membantu perencanaan keuangan, tata kelola, serta pengawasan dan audit
